

melalui sentuhan *tarbiyah harokiyah* dan tarbiyah untuk menguatkan eksistensi peran politik partai yang dilakukan melalui *tarbiyah hizbiyah* yang di dalamnya terdapat esensi *tarbiyah siyasiyah*. Keduanya terwadahi sebagai *tarbiyah islamiyah* yang pada hakikatnya menekankan setiap kader tarbiyah pada pembentukan *syakhsiyah islamiyah* (kepribadian muslim) sebagai teladan bagi manusia dan *syakhsiyah daiyah* (kepribadian dai) sebagai penyeru manusia untuk masuk ke dalam Islam (wawancara dengan Takariawan, 24 Maret 2010).

Gerakan Tarbiyah memiliki peluang untuk melakukan transformasi berbasiskan pendidikan politik (tarbiyah siyasah) pada akhirnya juga diorientasikan untuk memungkinkan para aktivis gerakan ini berpartisipasi politik (*al musyarokah as-siyasi*). Diawali dengan partisipasi sosial (*musyarokah ijtimaiyah*) dalam bentuk keterlibatan aktif dalam upaya pengokohan dan penyehatan kondisi masyarakat dalam segala aspeknya, ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, dan maliyah. Dengan basis dukungan masyarakat yang kokoh, maka langkah berikutnya diharapkan akan menjadi mudah. Pembentukan institusi politik akan memiliki dukungan publik yang memadai, begitu pula ketika memasuki arena Pemilu (*al-intikhobiyah*), memasuki parlemen, maupun pemerintahan (Jasiman, 2005).

### **Format Pendidikan Politik transformatif**

Dengan menelaah pemikiran politik PKS, termasuk mendasarkan pada konsepsi PKS mengenai politik/*siyasah*, jihad di wilayah politik (*jihad siyasi*), serta dengan berbagai konsepsi dan model pendidikan politik yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disusun format pendidikan politik PKS berdasarkan sekumpulan atribut/ciri dasar yang melekat pada pendidikan politik pada umumnya.

Pemahaman di atas akan dikaji dengan konsepsi pendidikan politik Islam (*tarbiyah siyasiyah islamiyah*), mengingat konsepsi *tarbiyah siyasiyah* PKS lebih dekat serta mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Adapun aspek yang paling penting dalam kajian mengenai ‘manhaj tarbiyah’ model pendidikan politik dapat dikategorikan penulis ke dalam tiga dimensi pokok, yaitu: dimensi tujuan, metode, dan kurikulum cakupan sebagai ciri-ciri dasar yang melekat pada pendidikan politik.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PKS dipahami sebagai upaya untuk memberikan landasan/fondasi dasar mengenai *siyasah/politik* secara menyeluruh agar setiap

kader mampu, senang, dan aktif berperan serta dalam merealisasikan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudharatan. Cara yang ditempuh, antara lain: dengan memberikan penerangan serta pemahaman kepada kader tentang berbagai persoalan umat, khususnya yang berkaitan dengan sikap politik kaum muslimin, menanamkan kesadaran tentang pentingnya *jihad fisabilillah* (upaya pembebasan manusia dari perbudakan manusia lain atau oleh hawa nafsunya) sebagai pilar utama dalam menegakkan agama Islam (kurikulum tarbiyah islamiyah,2000).

Tujuan pendidikan politik PKS pada fase gerakan dakwah, yaitu mewujudkan keberdayaan *siasah* yang berakar pada doktrin amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kewajiban setiap muslim sehingga memungkinkan setiap kader menjadi mandiri yang pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi pada pembentukan umat dan masyarakat politik yang mandiri pula ( Al-Ghazali, 2001).

PKS melalui pendidikan politiknya hendak pula memberikan batasan-batasan moralitas politik kepada pengurus dan kader, memberikan kerangka konseptual tentang landasan-landasan syar'i terkait aktivitas berpolitik, serta memberikan penguatan terhadap *musyarakah siyasiyah* (partisipasi politik). Dengan demikian tujuan dari pendidikan politik PKS pada dasarnya mengalami perluasan sesuai dengan tataran politik yang semakin berkembang, tidak sebatas pada terbentuknya pribadi muslim sebagai kader *siyasah* yang memiliki kesadaran semata, akan tetapi sekaligus kader yang turut serta berpartisipasi dalam bidang politik yang nantinya berpeluang dalam pembentukan kepribadian politiknya ( Dzakirin,2010:14).

Metode yang diaplikasikan PKS dalam pendidikan politiknya, yang meliputi: ceramah dan diskusi/tanya jawab yang dilakukan pada forum *halaqoh*, dan sarana lain, yakni: *tatsqif* (*tarbiyah tsaqofiyah*), pelatihan (*training*), antara lain: Training Dasar (TD), yang meliputi: TD-I dan TD-II, Training Lanjutan (TL), TMKS), dan kajian (Kajian Ilmu Sosial Politik (KISP), yang meliputi: KISP-I, KISP-II, dan KISP-III) dengan metode tambahan yang berupa: praktek, mandiri, *case study* (studi kasus), panel, serta *personal action plan*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode pendidikan politik PKS semakin variatif dalam perkembangannya dari gerakan dakwah sampai saat ini.

Ridha (2002:43), menyatakan bahwa muatan-muatan utama yang senantiasa menjadi fokus *tarbiyah siyasiyah* pada dasarnya meliputi tiga hal, yakni: 1.Menyangkut masalah prinsip

dan pokok-pokok pemikiran yang dapat membentuk wawasan siasah, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya tentang ideologi dan doktrin-doktrin siasah; 2. Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, misalnya tumbuhnya kepribadian, kesadaran, dan partisipasi siasah; 3. Menyangkut sarana, lembaga, dan metode yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Materi dalam pendidikan politik bukan sesuatu yang masih dalam proses tawar-menawar, tetapi bagian dari suatu aspek yang ingin diperjuangkan, sehingga perlu dipersiapkan suatu proses belajar yang sistematis. Secara ideal materi pendidikan politik ditentukan melalui proses interaksi agar menjadi proses dialektis, bukan proses yang satu arah (Mahardika, 2001:93).

Kurikulum cakupan dalam Sistem/model pendidikan politik PKS dapat diklasifikasikan sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, yang meliputi kelompok materi: keislaman, kepartaian, pengenalan struktural PKS, wawasan politik dan sejarah, ketrampilan/*skill*, dan pelengkap dengan penekanan sekaligus penguatan pada aspek ketrampilan (*skill*), yang meliputi: pengembangan diri dan kepemimpinan, manajemen dan organisasi, pemerintahan dan sosial politik serta penguatan *analysis capability* (kapabilitas analisis), yang meliputi: analisis hukum lokal, analisis ekonomi lokal, analisis sosial dan budaya lokal, analisis politik lokal, analisis birokrasi lokal yang diprioritaskan bagi calegnya. Dapat dipahami bahwa kurikulum cakupan pendidikan politik PKS terutama ditujukan pada pemberdayaan pengurus dan peran anggota legislatif. (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2001).

Untuk merealisasikan tujuan tidak hanya ditempuh melalui metode indoktrinasi seputar ideologi PKS, dan doktrin *siasah*, tetapi juga mencakup metode yang menggunakan sistem belajar (persekolahan/perkuliah) sebagaimana halnya tatsqif, sekolah pengurus, dan sekolah politik yang diimplementasikan PKS sebagai cara untuk menanamkan pemahaman politik melalui penyampaian materi *siasah*, serta menyediakan praktek lapangan dan pelatihan *siasah*, yang meliputi: ketrampilan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, *team building* dan produktivitas tim, teknik provokasi dan advokasi, ketrampilan administrasi, jurnalistik, analisis SWOT, pengambilan keputusan, manajemen kampanye, teknik perencanaan dan lain sebagainya sebagai pembekalan pengalaman individu yang diharapkan dapat mengembangkan potensi kemampuan *siasah* kader (Modul Tarbiyah Islamiyah untuk Murobbi, 2009).

Tujuan pendidikan politik tidak sebatas memberikan kesadaran dan partisipasi politik secara konseptual-teoritis, akan tetapi sekaligus memberikan keteladanan politik praktis sebagai manifestasi kristalisasi kepribadian politik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa melalui sistem pendidikan politiknya, PKS hendak membangun legitimasi publik dengan komitmen dan konsistensinya dalam aktivitas dakwah politik sehingga memiliki peluang mengikis keputusan masyarakat akan perubahan ke arah yang lebih baik pada bangsa ini (Ahmad Dzakirin, 2010). Tujuan pendidikan politik PKS tersebut dalam batas tertentu merupakan respon dan solusi pada realitas kehidupan politik yang ada pada masyarakat yang mulai jauh dari nilai-nilai ideal ( Denoeux,2007).

Berdasar pemikiran demikian, maka menanamkan pengetahuan mengenai moralitas politik Islam adalah menjadi keniscayaan bagi gerakan apapun yang mengatasnamakan 'Islam' karena sesungguhnya dalam koridor ini Islam tidak bisa sekedar diposisikan sebagai *platform* yang tidak mampu menunjukkan identitas gerakan dan justru lemah terhadap dominasi kekuasaan negara, akan tetapi harus dijadikan sebagai acuan nilai yang akan melahirkan sikap, perilaku, serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam secara konsisten (Kurikulum Tarbiyah Islamiyah, 2000).

Penguatan tujuan pendidikan politik PKS diarahkan pula untuk memberikan kerangka konseptual tentang aktivitas politik yang islami dalam rangka menumbuhkan kesadaran politik kader. Landasan yang penting dibangun adalah mengenai keberadaan politik serta partai politik itu sendiri. Bahasan tentang politik pada dasarnya akan berkaitan erat dengan negara, masalah kekuasaan, otoritas, serta konflik. ( Rozak, 1999:41).

PKS sebagai salah satu representasi dari kelahiran Gerakan Islam (Islam politik) di Indonesia memaknai politik sebagai bagian dari Islam yang bersifat *syamil*/menyeluruh yang pada hakikatnya juga mengatur seluk beluk interaksi kehidupan umatnya, termasuk masalah politik. Dari berbagai pemikiran serta aktivitas yang dilakukan oleh PKS sebagai manifestasi dari Islam politik dapat ditangkap bahwa ia berupaya untuk mewujudkan pola hubungan Islam dengan negara menjadi semakin terintegrasi, namun tetap kritis terhadap pemerintah yang berkuasa dengan senantiasa mendasarkan aktivitas perjuangannya pada nilai-nilai Islam. Gerakan politik moral yang diperlihatkan oleh kader-kader PKS turut memberikan nuansa yang berbeda

pada format pendidikan politiknya yang dapat dipahami sebagai wujud perhatian PKS untuk turut memikul tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dengan demikian format pendidikan politik PKS pada dasarnya searah dengan sistem pendidikan politik Islam. Dalam tataran tujuan, format pendidikan politik yang hendak dibangun oleh PKS adalah model pendidikan politik yang dapat mengantarkan manusia menuju kesempurnaannya sebagai makhluk *siasah*, memunculkan sosok kader yang memahami identitas dan ideologi Islam, memahami strategi pertahanan partai, mampu mendorong aktivitas politik kader maupun masyarakat sebagai bagian dari amal Islami, melakukan penguatan sekaligus peningkatan kapasitas pemahaman, kesadaran, serta partisipasi kader dalam dunia politik, membekali kader untuk dapat memunculkan kultur politik baru, mampu merealisasikan pemberdayaan masyarakat, serta mampu membekali kader agar memiliki kualitas, dan kelaikan, serta sanggup menghadapi tantangan internal maupun eksternal di pentas politik. Mampu menjadi bagian dari solusi yang dibutuhkan oleh ummat Islam ( al Qordhowy, 2004).

Namun dalam realitasnya tujuan pendidikan politik PKS yang dipraktikkan sampai dengan Pemilu 2009 masih menggunakan model yang konvensional, secara umum belum mampu menghasilkan kader yang mampu untuk menghadapi tantangan dan medan politik yang baru di Indonesia, masih banyak kader PKS yang gamang. Sementara itu dalam tataran dimensi metode dan kurikulum cakupannya pada dasarnya diorientasikan pada pengembangan model pendidikan politik Islam agar mampu mencapai sasaran *siasah islamiyah* dalam tataran politik saat ini. (wawancara dengan Abu Ridha, 30 Agustus 2010).

### **Dilema Pendidikan Politik PKS sebagai Instrumen Transformasi**

Dari perspektif sebagaimana dikemukakan tentang manhaj pendidikan politik yang dimiliki oleh Gerakan Tarbiyah (PKS) kiranya dapat dielaborasi lebih rinci. Ada Beberapa keterbatasan manhaj/sistem pendidikan politik yang dieksperimentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari pemerhatian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan pendidikan politik serta penelaahan dokumen ditemukan berbagai keterbatasan sebagai berikut.

1. Manhaj/sistem pendidikan politik semenjak awal sangat kuat dipengaruhi oleh model – model pendidikan untuk lingkungan kampus dengan segmen peserta dari kalangan terpelajar, mudah menyerap informasi, kebanyakan kelas menengah. Maka ketika model pendidikan politik tersebut dipakai untuk memperluas basis dukungan PKS ke basis massa yang lebih luas misalnya masyarakat pedesaan, kalangan petani, kalangan buruh, orang-orang yang kurang terpelajar, komunitas yang secara sosiologis bukan dari kalangan santri mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk dikembangkan. Manhaj ini mengalami dilema antara disatu sisi menekankan kualitas dengan dukungan massa terbatas atau lebih mementingkan kuantitas dengan mengabaikan kualitas.
2. Manhaj pendidikan politik PKS yang diinspirasi oleh Manhaj Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, membutuhkan revisi, modifikasi, adaptasi dengan mengingat faktor kondisi dan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Manhaj pendidikan politik PKS masih memerlukan adaptasi dari berbagai aspek untuk dapat digunakan bagi kepentingan memperluas basis dukungan. Adaptasi tersebut terkait dengan penyerderhanaan materi (isu-isu yang akan diberikan); adaptasi model pembelajarannya; penyerderhanaan bahasa yang digunakan; simbol-simbol kultural yang memungkinkan untuk dipahami oleh kalangan bawah; penyerderhanaan bahasa-bahasa ideologis yang abstrak menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh kalangan bawah. Orientasi pendidikan politik yang terlalu ideologis yang melahirkan out put dengan sosok kader PKS yang ideologis, militan, kurang komunikatif secara budaya dan simbol dapat dinyatakan sebagai salah bentuk keterbatasan manhaj tarbiyah siyasah yang dimiliki PKS. Manhaj tarbiyah mengalami dilemma antara disatu sisi mempertahankan orisinalitas manhaj dan kepentingan pragmatis untuk melakukan modifikasi, moderasi manhaj.
3. Dari pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa hanya sedikit kader partai yang dapat melampaui tahapan-tahapan pengkaderan yang dilakukan oleh PKS. Kondisi tersebut menyebabkan banyak calon kader yang patah di tengah jalan, tidak meneruskan pengkaderan pada tahap selanjutnya. Hal-hal yang menyebabkan terputusnya pengkaderan (kehilangan calon kader) antara lain; pertama; belum tersedianya instruktur yang memiliki kompetensi keilmuan yang dibutuhkan oleh anggota; kedua, karena adanya orientasi yang kurang jelas; ketiga materi dan proses pengkaderan tidak

sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anggota; keempat, anggota pemula merasa bosan karena proses yang terlalu panjang dan sebagainya merasa terlalu berat. Manhaj mengalami dilema antara mempertahankan orientasinya sebagai partai kader dengan recruitmen yang ketat atau partai massa dengan recruitmen yang longgar.

4. Secara kuantitatif jarang sekali ditemukan bahwa jumlah anggota yang mengikuti pengkaderan yang dapat bertahan dari tahapan awal sampai akhir tanpa mengalami penyusutan jumlah anggota. Sering terjadi bahwa proses penyusutan tersebut terjadi sangat dratis.
5. Model pendidikan politik yang dimiliki oleh PKS sekalipun terbukti telah mampu menghasilkan kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan pada partai akan tetapi model pendidikan politik PKS masih memiliki keterbatasan dan kelemahan untuk dapat menembus basis massa yang lebih luas. Hal tersebut dikonfirmasi oleh hasil perolehan suara PKS dari tiga kali Pemilu masih disekitar angka 7%. Capaian PKS belum bisa menembus angka diatas 10- 15 % suara nasional.

Dari keseluruhan pembahasan tentang dilemma pendidikan politik sebagai basis transformasi, sebagaimana telah diuraikan kiranya dapat dibuat suatu pernyataan bahwa Gerakan Tarbiyah secara internal pada dirinya dalam batas tertentu telah mampu melakukan suatu proses transformasi institusional dari semula mengambil bentuk kelembagaan yang bersifat informal organization (gerakan bawah tanah) yang terkenal dengan Jemaah Tarbiyah pada masa pemerintahan Orde Baru dalam rentang tahun 1980-an sampai akhir 1990-an berubah menjadi suatu partai politik yang bersifat organisasi formal, masuk dalam struktur politik formal yang absah di Indonesia (Macmudi, 2008:125-130). Namun harus segera ditambahkan bahwa kemampuan Gerakan Tarbiyah dengan Manhaj Tarbiyahnya menghadapi keterbatasan dan dilemma dalam melakukan proses transformasi baik transformasi internal maupun eksternal. Manhaj tarbiyah menghadapi dilemma antara disatu sisi mempertahankan orintasi pendidikan politik yang menekankan orisinalitas, keaslian manhaj, kualitas tetapi dengan caain dukungan massa yang terbatas atau disisi yang lain lebih menekankan kuantitas dukungan massa dengan mengabaikan orisinalitas manhaj dan kualitas proses pendidikan pendidikan politik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari deskripsi dan pembahasan sebagaimana telah disampaikan, akhirnya dapat ditarik satu kesimpulan sebagai berikut.

1. Manhaj pendidikan politik yang dalam derajat tertentu telah berperan untuk terjadinya transformasi gerakan, yakni dari Gerakan Tarbiyah berubah mengalami metamorfosa menjadi gerakan politik dalam bentuk menjadi partai politik.
2. Manhaj pendidikan politik dalam perkembangan selanjutnya ketika berada pada fase gerakan memasuki gerakan politik, mengalami dilema pada satu sisi untuk tetap berperan mendorong terjadinya transformasi atau harus mengalami pergeseran-reduksi orientasi lebih berfungsi sebagai pewarisan nilai-nilai dan pemberi legitimasi kebijakan yang diambil oleh elit politik. Pada fase gerakan politik, fungsi pendidikan politik menumbuhkan kesadaran kritis dan membangun sistem yang ideal menjadi tereduksi.

### **Saran**

- Manhaj pendidikan politik Jemaah Tarbiyah perlu dilakukan kontekstualisasi dengan kondisi keindonesiaan khususnya pada orientasi pendidikan politik dan struktur kurikulum pendidikan politik, supaya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas.
- Jalan keluar untuk mengatasi dilema yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan politik diperlukan kebijakan yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai dasar manhaj tarbiyah disatu sisi serta melakukan inovasi pada nilai-nilai yang bersifat instrumental.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Purwosantoso, MA. dan Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA. atas kebaikan hatinya dan ketulusannya memberikan limpahan ilmu dan bimbingan yang hangat selama proses penelitian dan penulisan naskah disertasi berlangsung di Program Studi Ilmu Politik S3 Fisipol UGM. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota Jemaah Tarbiyah yang telah berbaik hati untuk menerima penulis melakukan serangkaian wawancara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abdul Hamid. 2001. *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat: Telaah Ilmiah terhadap Konsep Pembaharuan Hasan Al Banna*. Jakarta: Al-'Itishom Cahaya Umat.
- Ali Said Danamik. 2002. *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Teraju, Bandung.
- Amy Gutmann. 1999. *Democratic Education*, Princeton University Press, Princeton New Jersey.
- Alfian.1986. *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Ahmad Dzakirin. 2010. *Tarbiyah Siyasiyah menuju kematangan Politik Aktivis Dakwah*, Penerbit Adicitra Intermedia, Surakarta,
- Abu Ridho.2002. *Tarbiyah Syasah* ,Penerbit Syamil, Jakarta.
- Abdul Rozak, Jeje. (1999). *Politik Kenegaraan, Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ben Rosamond. 2002. *Politics: an introduction second edition*, Routledge, London.
- Dictionary of Education,1973.
- Guilain Denoeux, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1105/10/0804.htm/> 3 Oktober 2007
- Ismatu Ropi. 2007. *Membangun 'Masyarakat Islami' dan Ideologisasi Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, dalam buku *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, Jurnal CSIS, Jakarta.
- Jasiman, 2005. *Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah*, Penerbit Auliya Press, Solo, *Handout materi perkuliahan Sosial Politik Islam I TTs*
- Kurikulum Tarbiyah Islamiyah Buku 1, Buku 2, diterbitkan oleh Tim Kerja Penyusunan Kurikulum, Solo, 2000.
- Louis J. Cantori. 1999. *Political socialization a Note on the Ambiguity of Political socialization: Defenitions, Cruticims, and Strategics of Inquiry*, dalam *Comparative Politics*.
- Manhaj Tarbiyah Partai Keadilan Sejahtera, Media Insani Press, Solo, 2005.
- M. Imdadun Rahmat.2008. *Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, diterbitkan oleh LkiS Yogyakarta.
- Modul Tarbiyah Islamiyah untuk Murobbi, diterbitkan oleh Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah (LKMT) dan Robbani Press, Jakarta, 2009.
- Oliver Roy, *Channging Patterns among Radical Islamic Movement*, The Brown Journal of World Affairs, Vo. VI Issue 1 ( Winter/pring, 1999).
- Syamsul Hilal. 2003, *Gerakan Dakwah Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.

Stanley Allen Renshon. 1977. *Handbooks of Political socialization Theory and Research*, The Free Press a division of Macmillan Publishing Co.. Inc. London.

Utsman Abdul Mu'iz. .2000. *Tarbiyah Siyasah 'Inda Jama'ah Al Ikhwan Al Muslimin*, terjemah, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, penerbit Intermedia, Solo.

Umum Yasmin. 2002. *Materi Tarbiyah Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*. Solo: Media Insani Press.

Yon Machmudi.2008 *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*, Publisheb by ANU E Press, The Australian National University.

Yusuf al Qardhawi. 2004. *Konsep Islam Solusi Utama Bagi Ummat*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Cahyadi Takariawan, Wakil Ketua Partai Keadilan 1999-2004 DPW DIY, Anggota Majelis Syuro DPP PKS 2005-2010, 2010-2015) pada 24 Maret 2010), di Yogyakarta.

Wawancara dengan Bapak Idham Ananta Timur pada 25 Maret 2010.

Wawancara dengan Ustadz Abu Rido, tanggal 30 Aguatus 2010 di Jakarta salah seorang Ideolog Gerakan Tarbiyah (PKS).